

REAL
INTEGRITY IS
DOING THE
RIGHT THING,
KNOWING
THAT
NOBODY'S
GOING TO
KNOW
WHETHER
YOU DID IT
OR NOT.

OPRAH
WINFREY

Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	
Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara dan Swasta					
20.	Inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi	Badan Standardisasi Nasional	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Komisi Pemberantasan Korupsi 4. Badan Pusat Statistik	Terselesainya standar internasional serupa <i>International Organization for Standardization (ISO) 37001</i> untuk sektor swasta dan Pemerintah di akhir tahun 2016	1. Tersusunnya kajian mengenai draft ISO 37001 2. Ikut sertanya Badan Standardisasi Nasional (BSN) ke dalam komite ISO

21. Penyusunan ...

Sumber : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, dimana BSN bertanggung jawab menginisiasi upaya sertifikasi anti korupsi.

Sebagai tindak lanjut aksi tersebut, BSN telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuaan pada November 2016 lalu. Standar ini merupakan adopsi identik dari standar internasional ISO 37001.

Kajian kelembagaan, regulasi, mekanisme pelaksanaan akreditasi dan skema sertifikasi saat ini tengah disiapkan. "Maret 2017 diharapkan sudah siap. Jika akan menerapkan SNI ISO 37001, kalau mau sertifikasi

kemana sudah siap," kata Kukuh S. Achmad, Deputi bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, BSN.

Dalam penyusunan skema sertifikasi tersebut, BSN bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, BPKP, Ombudsman RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Pusat Statistik, PPAK, dan Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI). Selain itu, BSN juga akan terus mensosialisasikan SNI ISO 37001 dan cara sertifikasinya. Diharapkan pada Juli - September 2017 nanti semuanya sudah tuntas.

Kukuh mengungkapkan, organisasi yang menerapkan SNI ISO 37001 memperoleh

manfaat antara lain persyaratan minimal dan panduan untuk mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuaan, jaminan kepada manajemen, investor, pekerja, *customer* dan *stakeholder* lainnya bahwa organisasi melakukan langkah-langkah tertentu untuk mencegah terjadinya penyuaan, serta menyediakan bukti pada saat ada pemeriksaan bahwa organisasi melakukan langkah-langkah tertentu untuk mencegah terjadinya penyuaan. (Heru)

JANUARI 2017

Inpres No. 10/2016	1
SNI ISO 37001 : 2016	2
ISO TC 309	3
PKPT 2017	4

Dukung Anti Korupsi, BSN Tetapkan SNI ISO 37001:2016



sertifikasi terhadap implementasi standar tersebut, termasuk auditor-auditor dan pesonel manajemennya.

Pada acara tersebut, menampilkan narasumber dari KPK dan Sekretariat ISO. Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Supradiono menyatakan bahwa kita membutuhkan standar dan panduan bagi entitas bisnis untuk patuh kepada regulasi

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Salah satu tindakan pemerintah menghadapi masalah tersebut adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan kepada pemerintah daerah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dari berbagai aspek sesuai karakteristik tupoksi instansi masing-masing.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia diberi tugas untuk melakukan inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi dengan mengacu pada ISO 37001:2016, melakukan acara *Knowledge Sharing* dan Bedah Standar SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan, di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2016.

ISO sebagai organisasi internasional telah mengeluarkan standar ISO 37001:2016 *Anti-Bribery Management System* pada tanggal 14 Oktober 2016. Dilanjutkan, pada bulan November ini BSN telah mengadopsi standar ISO 37001 ini menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui SK Kepala BSN No. 248 Tahun 2016.

Saat ini BSN bekerjasama dengan para pemangku kepentingan juga sedang mempersiapkan infrastruktur penilaian kesesuaian untuk implementasi standar SNI ISO 37001 tersebut. Infrastruktur penilaian kesesuaian terdiri dari Lembaga Sertifikasi yang akan melakukan



yang ada. "Mengikat sekaligus meningkatkan persaingan bisnis yang fair," katanya. ISO 37001 adalah *milestone* yang harus disikapi secara serius oleh regulator dan penegak hukum, selain isu *private sector corruption act*, *beneficial ownership*, *corporate liability*, Indonesia Bribery Act dan Foreign Bribery.

Sementara itu, Loi Kheng Min, *Vice Chair Project Committee (ISO/PC) 278 Anti-bribery management systems* mengungkapkan bahwa sistem manajemen anti penyuapan dirancang untuk menanamkan budaya anti suap dalam suatu organisasi. ISO 37001 memberikan persyaratan dan panduan untuk membangun, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen anti penyuapan (www.bsn.go.id).

ISO/TC 309



International Organization for Standardization

ISO/TC 309 *Governance of organizations*

merupakan salah satu komite teknis ISO yang mengurus bidang pemerintahan berkaitan dengan aspek arah, pengendalian dan akuntabilitas organisasi.

Didirikan pada tahun 2016

Standar yang telah dipublikasikan, yaitu

[ISO 19600:2014](#) *Compliance management systems – Guidelines*

[ISO 37001:2016](#) *Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use*

Standar yang dalam proses penyusunan

[ISO/AWI 37003](#) *Guidance for the governance of organizations*

Keanggotaan, terdiri dari

[41](#) Participating members (anggota tetap), termasuk Indonesia

[21](#) Observing members

Kelompok Kerja Working group

Reference	Title
ISO/TC 309/AG 1	Communications and Engagement
ISO/TC 309/AHG 1	Strategic Business Plan
ISO/TC 309/AHG 3	Whistleblowing
ISO/TC 309/TG 4	Anti-bribery management systems
ISO/TC 309/TG 5	Compliance management systems
ISO/TC 309/WG 1	Guidance for the governance of organizations

Sekretariat ISO/TC 309

[BSI](#) United Kingdom, British Standards Institution

Alamat : 389 Chiswick High Road, London W4 4AL

Tel: +44 208 996 90 00

Fax: +44 208 996 74 00

Email: standards.international@bsigroup.com

Web: <http://www.bsigroup.com>

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA. 2017

Inspektorat Badan Standardisasi Nasional

No.	Nama Obyek Pengawasan	Bulan
I	AUDIT	
1	Audit Triwulan I	April
2	Audit Triwulan II	Juli
3	Audit Triwulan III	Oktober
4	Audit Triwulan IV	Desember
II	REVIU	
1	Laporan Keuangan TA. 2016 (unaudited)	Februari
2	Laporan Keuangan TA. 2016 (audited)	April
3	Laporan Keuangan TA. 2017 (Semester I)	Juli
4	RKA-KL	Juli, Oktober
5	RKBMN	Juli, Oktober
6	LAKIP Instansi TA 2016	April
7	LAKIP Eselon I & II TA 2016	Mei
III	EVALUASI	
1	SAKIP Instansi TA 2016	Februari
2	SAKIP Eselon I & II TA 2016	Januari
IV	PENGAWASAN LAINNYA	
1	Pelatihan di Kantor Sendiri	Maret–Desember
2	Kegiatan Konsultasi/Asistensi	Januari-November
3	Pelaksanaan FGD FILI	November
4	Seminar Hari Anti Korupsi	Desember
5	Diklat Teknis	Juni, Agustus, Desember
6	Telaah Sejawat	Mei
7	Monitoring Program <i>Quality Assurance</i> dan perbaikannya	Juni
8	Pedoman Pengawasan	Februari
9	Keanggotaan Organisasi Profesi	Januari–November

**INSPEKTORAT
BSN**

**Integritas
Profesionalisme**

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA. 2017

Inspektorat Badan Standardisasi Nasional

No.	Nama Obyek Pengawasan	Bulan
V	PEMANTAUAN	
1	Pemantauan Kegiatan Unit Kerja	Februari – November
2	Rapat Kerja Inspektorat	Februari – Agustus
3	Pemantauan Tindak Lanjut Audit PBJ dan Triwulan III Th 2016 (sebelumnya)	Januari
4	Tim Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI	Februari – April
5	Pemantauan Tindak Lanjut Audit Kinerja	April
6	Pemantauan Tindak Lanjut Audit PNPB Triwulan III	September
7	Pemantauan Tindak Lanjut Audit Keuangan Triwulan III	Oktober
8	Pemantauan Tindak Lanjut Audit Kinerja Belanja modal TW III	Desember
9	Pemantauan Tindak Lanjut Audit Kinerja belanja barang TW III	Desember
10	Pengendalian Intern (Penyusunan Analisis Resiko pada 11 Unit Kerja, Pemantauan RTP SPIP Semester II Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017	Februari–November
11	Monitoring Pedoman Pengawasan Internal (SMM dan E-audit)	Maret – Agustus
12	Penyusunan PKPT 2017	Januari
13	Penyusunan UPKPT 2018	September
14	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Januari, Maret–Juli, November
15	Pengawasan Kegiatan BSN di luar kota	Maret, Juni, Agustus, Oktober, November
16	Monev LHKPN	Juni, Desember
17	Sistem Penanganan Pengaduan (WBS)	Februari, Mei, Juni
18	Monev ZI / WBK	Juli, Oktober
19	Pelaksanaan & Pelaporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB)	Februari–Maret
20	Pemantauan dan Evaluasi Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)	Juni, Desember
21	Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi	Juni, Desember
VI	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Januari–Desember

**INSPEKTORAT
BSN**

**Integritas
Profesionalisme**